

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah utarakan menurut George C. Edward berkaitan dengan faktor keberhasilan implementasi kebijakan, maka mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Pondok Pucung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi, pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal antar tim pelaksana maupun pendamping. Bukti itu diperkuat dengan adanya pandangan yang disampaikan salah satu implementor pada perangkat kelurahan dengan adanya pertemuan satu bulan sekali sebagai satu langkah menyamaratakan misi dan konsistensi aturan dalam penyaluran bantuan tersebut. namun pada sisi yang berbeda masih terdapat sedikit persoalan pada sosialisasi BPNT yaitu Keterbatasan informasi dan komunikasi penyaluran bantuan bagi KPM
2. Sumber Daya dalam Implementasi Program BPNT di Kelurahan Pondok Pucung sumber daya implementor juga dapat dinyatakan sudah baik, dengan dasar bahwa implementor sudah melaksanakan dan para pendamping Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung mendampingi para KPM
3. Disposisi, pada bagian ini merupakan berkaitan karakteristik implementor yang dipegang teguh dalam implementasi kebijakan dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan yaitu BPNT, seperti komitmen, kejujuran, dan lainnya. Bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh penerima manfaat pada saat wawancara bahwa implementor seperti Tim Pelaksana, dan Tim Pendamping sudah melaksanakan tugasnya dengan baik mendampingi juga

mengayomi dengan sopan kepada mereka, maka dapat dikatakan disposisi dalam BPNT sudah diterapkan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP), struktur implementor BPNT cukup sederhana dan ringkas, maka akan mempengaruhi percepatan pelaksanaan penyaluran bantuan bagi KPM setiap bulannya, maka dapat dikatakan struktur birokrasi terkait BPNT sudah berjalan dengan baik.

Adapun hambatan implementasi pada kebijakan pemerintah yakni program penanggulangan kemiskinan tetap ada, yaitu:

1. Mentalitas ketergantungan bantuan bagi KPM karena tidak diiringi dengan konsep pemberdayaan, yang jika dipahami bantuan yang berikan hanya sementara dan kondisi tertentu
2. Belum meratanya penyaluran bantuan bagi yang membutuhkan
3. Keterbatasan Informasi bagi KPM baik berkaitan dengan waktu penyaluran bantuan ataupun tentang BPNT itu sendiri
4. Jarak tempuh pengambilan sembako yang terbilang cukup jauh

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung Program BPNT khususnya di Kelurahan Pondok Pucung adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang baik agar tidak ada Keterbatasan informasi dan komunikasi penyaluran bantuan bagi KPM, dilandasi koordinasi yang baik dan sejalan antara Tim Pelaksana dan Tim Pendamping penyaluran BPNT, agar dapat diakses dengan baik informasi berkaitan waktu dan tempat penyaluran bantuan bagi KPM, terutama bagi KPM yang berdomisili cukup jauh dari tempat pengambilan bantuan.
2. Memperbanyak fasilitas pengambilan sembako, dari 11 Kelurahan di Kecamatan Pondok Aren terbagi menjadi 3 tempat/posko pengambilan

sembako, yaitu Aula Kelurahan Pondok Betung, Aula Kelurahan Jurang Mangu Barat, dan Aula Kelurahan Parigi Lama. Yang mana KPM berasal dari Kelurahan Pondok Pucung penyaluran BPNT-nya bertempat di Kelurahan Jurang Mangu Barat yang terbilang cukup jauh, dengan segala pertimbangan kondisi KPM yang ada semisal lansia, dan tidak memiliki kendaraan maka perlu adanya penambahan fasilitas tempat penyaluran BPNT bagi para KPM.

3. Perlu di perhatikan penyaluran bantuan bagi yang membutuhkan dengan merata, dengan maksud agar bantuan meringankan beban ekonomi masyarakat melalui bantuan pangan tepat sasaran dan tujuan, maka diperlukan pendataan pencocokan dan penlitian seleksi bertahap bagi para KPM.
4. Mentalitas ketergantungan bantuan bagi KPM, hal tersebut terjadi karena pemberian bantuan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah tanpa diiringi dengan metode pemberdayaan KPM yang berjangka, agar KPM berdaya pada kakinya sendiri.